

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH  
INDONESIA (PSSI) MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA DITINJAU  
DARI STATUTA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL  
ASSOCIATION (FIFA)  
(STUDI KASUS SANKSI ADMINISTRATIF PSSI OLEH KEMENTRIAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA (KEMENPORA) TAHUN 2015)**

**OLEH:**

**SUKRI IKHSANUR**

**1010112143**



**Pembimbing:**

- 1. Narsief, S.H.,M.H.**
- 2. Dewi Engriyeni, S.H.,M.H**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**

**No. Reg. 4860/PK-VII/III/2017**



No. Alumni Universitas	<b>SUKRI IKHSANUR</b>	No. Alumni Fakultas
(a) Tempat/Tgl Lahir : Sungai Sariak/07 Januari 1991 (b) Nama Orang Tua : M. Syahril dan Arjuni (c) Fakultas : Hukum (d) PK : Hukum Internasional (PK VII) (e) No. BP : 1010112143		(f) Tanggal Lulus : 27 Juli 2017 (g) Predikat Lulus : <b>Memuaskan</b> (h) IPK : 3,11 (i) Lama Studi : 6 tahun 11 bulan (j) Alamat : Jl. DPRD IV No. 1 Kel. Dadok Tunggul Hitam, Kec. Koto Tengah, Padang

(Sukri Ikhsanur, 1010112143, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 halaman, 2017)

### ABSTRACT

Pan-Indonesia Football Associations – *Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia*; hereinafter referred to as PSSI – is a sport organization with its own uniqueness in terms of regulation. In the one hand, PSSI is member of an international organization i.e. FIFA, which in this sense, PSSI must comply with FIFA Statutes as basic instrument in FIFA’s organizational regulation. Articles 13 and 17 of FIFA Statutes explicate that the membership of FIFA is single organizations instead of states, and every member organization must maintain its independency from any third party. In the other hand, PSSI as a legal organization that resides in Indonesia must comply with applicable laws therein. Article 13 of Law No. 3 of 2005 on National Sport System contains that the government is entitled to rule, foster, develop, implement and supervise the management of sports nationwide. Such uniqueness oftentimes lead to various issues. One of the issues is the intervention performed by the Ministry of Youth and Sports in 2015 which led to the dissolution of PSSI by the Ministry. Such intervention placed PSSI in a state of what may be deemed as a violation of FIFA Statutes. As a result, FIFA expelled PSSI from the organization’s membership, making football clubs within PSSI as well as Indonesian National Football Team are ineligible in many international matches and competitions. This research is aimed at identifying the status of PSSI as a sport organization before Indonesian national law and FIFA Statutes, and the sanction – in the form of intervention/administrative sanction – imposed by Indonesian Ministry of Youth and Sports; whether the sanction has been in accordance with the applicable laws in Indonesia as well as FIFA Statutes. This writing is a normative legal resesarch that analyses the applicable laws and other related literatures. The result of the research indicates that PSSI, as a sport organization in Indonesia is ruled, fostered, developed, and supervised by the Minister of Youth and Sports, and as member of FIFA, PSSI is required to maintain its independency and ensure such independency from any kinds of intervention form any third party. The dissolution of PSSI by the Minister is part of the Minister’s authority, yet it unfortunately is a breach to the FIFA Statutes which led to the expulsion and ban of PSSI by FIFA.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Juli 2017.  
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	<b>Prof. H. Firman Hasan, S.H., L.L.M</b>	<b>Dayu Medina S.H., M.H.</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional : **Hj. Magdariza, S.H., M.H.**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat nomor alumnus

No. Alumni Fakultas :	Petugas Fakultas/ Universitas	
	Nama :	Tanda tangan
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda tangan

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH  
INDONESIA (PSSI) MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA DITINJAU  
DARI STATUTA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL  
ASSOCIATION (FIFA)**

**(STUDI KASUS SANKSI ADMINISTRATIF PSSI OLEH KEMENTERIAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA (KEMENPORA) TAHUN 2015)**

(Nama: Sukri Ikhsanur, Nomor BP: 1010112143, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64+v  
hlm, 2017)

**ABSTRAK**

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau selanjutnya disebut PSSI adalah sebuah organisasi olahraga yang memiliki keunikan dari segi pengaturannya. Disatu sisi PSSI merupakan anggota dari Organisasi Internasional yaitu FIFA, yang mana PSSI harus tunduk dan patuh pada statuta FIFA sebagai instrumen dasar pengaturan organisasi FIFA. Dalam Statuta FIFA pada Pasal 13 dan 17 dijelaskan bahwa keanggotaan FIFA adalah asosiasi tunggal bukan negara dan setiap anggota FIFA wajib menjaga independensinya dari pihak ketiga manapun. Disisi lain PSSI sebagai organisasi yang berkedudukan dan berbadan hukum di indonesia harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Keunikan tersebut sering memunculkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahannya yaitu pada tahun 2015 lalu terjadi intervensi oleh KEMENPORA terhadap PSSI yang berujung pada pembekuan PSSI oleh KEMENPORA. Intervensi oleh KEMENPORA ini juga menempatkan PSSI pada posisi melanggar Statuta FIFA, yang juga berujung pada dikeluarkannya PSSI dari keanggotaan FIFA sehingga membuat klub-klub dan tim Nasional Indonesia tidak dapat ikut serta dalam kompetisi Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan PSSI sebagai organisasi olahraga menurut Hukum Nasional Indonesia ditinjau dari statuta FIFA, dan apakah sanksi administratif PSSI oleh KEMENPORA sudah sesuai menurut hukum nasional dan statuta FIFA. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur. Kesimpulan penulisan ini ditemukan bahwa keberadaan PSSI sebagai organisasi olahraga di indonesia diatur, dibina dikembangkan dan diawasi oleh MENPORA, dan sebagai anggota FIFA, PSSI diwajibkan menjaga independensinya dan bebas dari pihak ketiga oleh Statuta FIFA. Dalam kasus pembekuan PSSI oleh KEMENPORA hal tersebut sesuai dengan kewenangan Menpora namun merupakan pelanggaran terhadap statuta dan mengakibatkan disanksinya PSSI oleh FIFA.